

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kesejahteraan Sosial

2.1.1. Definisi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dipahami sebagai kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga individu mampu menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Suharto menegaskan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan nonmaterial seperti rasa aman, pengakuan sosial, serta kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi prasyarat penting bagi individu untuk dapat mengembangkan potensi diri dan menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. (Suharto Edi, 2014b)

Suharto Edi (2014b) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial harus dipandang sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan sistem sosial yang melingkupinya. Individu tidak dapat mencapai kondisi sejahtera secara mandiri tanpa adanya dukungan dari lingkungan sosial, kebijakan publik, dan lembaga sosial. Oleh karena itu, kesejahteraan sosial menurut adanya sistem yang mampu memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, menyediakan pelayanan sosial yang responsif terhadap kebutuhan

masyarakat, serta menciptakan ruang pemberdayaan yang memungkinkan individu dan kelompok untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial.

Dengan demikian, kesejahteraan sosial tidak dipahami sebagai kondisi yang statis, melainkan sebagai proses yang dinamis dan berkelanjutan. Proses ini menuntut keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat, dalam menciptakan sistem sosial yang adil, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi manusia. Dalam kerangka ini, program-program berbasis komunitas dan aktivitas kerja menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, karena memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan kemampuan, membangun kepercayaan diri, serta memperkuat peran sosialnya dalam masyarakat. (Suharto Edi, 2014b)

2.1.2. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi- fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Fahrudin, 2012)

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain :

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-

masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (Curative)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (Rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan (Development)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (Supportive)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

2.1.3. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Secara umum kesejahteraan sosial bertujuan untuk terciptanya kondisi kehidupan manusia yang layak. Kesejahteraan sosial itu memiliki dua tujuan utama, yakni: (1) Tercapainya kehidupan yang sejahtera dalam hal tercapainya taraf hidup dasar seperti sandang, papan, gizi, kesehatan dan hubungan sosial yang serasi dengan lingkungan hidup. (2) untuk

mengeksplorasi sumber-sumber, dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan standar hidup yang memuaskan, dan untuk mencapai hubungan yang sangat baik dengan masyarakat sekitar.

Namun jika mengacu kepada pandangan Schneiderman, Fahrudin (2012), maka paling tidak terdapat tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial, yakni :

1. Tujuan Pemeliharaan system

Tujuan kesejahteraan sosial adalah menjaga dan memelihara keseimbangan atau kesinambungan keberadaan nilai, norma sosial, dan aturan sosial dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pendefinisian makna dan tujuan hidup. Motif bertahan hidup individu dalam konteks individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

2. Tujuan Pengawasan system

Tujuan kesejahteraan sosial adalah melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau perilaku menyimpang dari nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Kegiatan- kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan pengawasan.

3. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial adalah inisiatif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari pemberdayaan sosial adalah untuk (1) memberdayakan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang menghadapi tantangan kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhannya. (2) meningkatkan peran serta lembaga dan/atau individu

sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah upaya untuk mencegah dan mengelola risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial bertujuan untuk mencegah dan mengelola risiko yang timbul dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, serta menjamin keberlangsungan hidup sesuai dengan kebutuhan dasar minimum. Perlindungan sosial diberikan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum. (Sukmana oman, 2022)

2.1.4. Bidang-bidang Kesejahteraan Sosial

Bidang- bidang kesejahteraan sosial menurut Edi Suharto merujuk pada ruang lingkup atau area utama intervensi kesejahteraan sosial yang menjadi dasar penyeleggaraan kebijakan, program, dan pelayanan sosial dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bidang-bidang kesejahteraan sosial dipahami sebagai kerangka operasional yang digunakan negara dan lembaga sosial untuk merespons masalah sosial, melindungi kelompok rentan, serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara secara sistematis dan berkelanjutan (Suharto Edi, 2014a) .

Bidang-bidang kesejahteraan sosial diartikan sebagai komponen utama dari pembangunan sosial yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui intervensi sosial yang terencana dan berkelanjutan. Midgley

memandang bidang-bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian dari strategi pembangunan kapasitas sosial, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan keadilan sosial dalam masyarakat (Midgley, 2014).

Zastrow menjelaskan bahwa bidang-bidang kesejahteraan sosial mencakup berbagai area pelayanan sosial yang saling berkaitan, antara lain

1 Pelayanan Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Bidang kesejahteraan anak dan keluarga merupakan area utama dalam kesejahteraan sosial yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, serta pengembangan fungsi sosial anak dan keluarganya. (Zastrow, 2010)

2 Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Mental

Bidang ini berfokus pada pemeliharaan dan pemulihan kondisi kesehatan fisik serta psikologis individu. Zastrow menekankan bahwa masalah kesehatan sering kali berkaitan erat dengan faktor sosial seperti kemiskinan, stres, dan ketimpangan akses layanan. Oleh karena itu, bidang ini tidak hanya memberikan layanan kuratif, tetapi juga upaya preventif dan rehabilitatif agar individu mampu berfungsi secara sosial dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat (Zastrow, 2010).

3 Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas

Bidang pelayanan bagi penyandang disabilitas bertujuan membantu individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, atau sensorik agar dapat hidup mandiri dan berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat. Bidang ini mencakup dukungan rehabilitasi, pelatihan

keterampilan, serta penyediaan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan sosial yang inklusif. Pendekatan kesejahteraan sosial dalam bidang ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak-hak penyandang disabilitas (Zastrow, 2010).

4 Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia

Bidang kesejahteraan lanjut usia berfokus pada pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, dan kesehatan kelompok lansia yang mengalami penurunan fungsi fisik maupun sosial. Zastrow menjelaskan bahwa pelayanan dalam bidang ini bertujuan membantu lansia mempertahankan kualitas hidup, kemandirian, serta rasa aman di masa tua. Selain itu juga berperan dalam mengurangi isolasi sosial dan meningkatkan dukungan sosial bagi lansia melalui pelayanan berbasis komunitas (Zastrow, 2010).

2.2. Konsep Pekerjaan Sosial

2.2.1. Definisi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial dipahami sebagai kegiatan profesional yang terorganisasi dan berlandaskan ilmu pengetahuan, nilai, serta keterampilan tertentu yang bertujuan membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial serta meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Fahrudin menekankan bahwa pekerjaan sosial berfokus pada upaya membantu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial melalui intervensi yang terencana dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pekerjaan sosial tidak

hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan pengembangan, sehingga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan (Fahrudin, 2012)

Pekerjaan sosial merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial yang berperan sebagai penghubung antara individu dengan sumber-sumber sosial yang tersedia di lingkungannya. Oleh karena itu, pekerja sosial dituntut untuk mampu memahami permasalahan sosial secara komprehensif serta mendorong perubahan sosial yang berpihak pada kelompok rentan dan marginal (Fahrudin, 2012)

Pendapat serupa juga yang dikemukakan oleh Zastrow (2010), yang mendefinisikan bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu profesi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dengan perhatian khusus kepada individu dan kelompok yang mengalami kerentanan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan. Pekerjaan sosial menurut Zastrow berfokus pada hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, serta berupaya memperkuat kemampuan individu untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapinya melalui intervensi profesional.

Zastrow juga menekankan bahwa pekerjaan sosial tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan langsung kepada individu atau kelompok yang mengalami masalah sosial, tetapi juga diarahkan pada upaya perubahan sosial dan pengembangan kebijakan sosial yang lebih adil dan responsif. Pekerjaan sosial berperan dalam mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang menyebabkan masalah sosial, seperti ketimpangan akses

terhadap layanan, diskriminasi, dan lemahnya sistem perlindungan sosial, serta mendorong adanya perubahan pada tingkat kebijakan dan kelembagaan. Melalui pendekatan tersebut, pekerjaan sosial tidak hanya membantu individu mengatasi masalah yang dihadapi, tetapi juga berupaya menciptakan lingkungan sosial yang mendukung keberfungsian sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian, pekerjaan sosial memiliki peran strategis dalam membangun kondisi sosial yang memungkinkan individu dan masyarakat hidup secara aman, produktif, berdaya, dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia (Zastrow, 2010).

Pekerjaan sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan Program Dali Kafe karena program tersebut merupakan bentuk intervensi sosial yang dirancang untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian individu spesial. Dalam perspektif pekerjaan sosial, tujuan utama intervensi adalah membantu individu agar mampu mengembangkan potensi dirinya, memenuhi kebutuhan hidup, serta menjalankan peran sosial secara optimal di tengah masyarakat dan memberikan ruang bagi individu spesial untuk belajar, bekerja, dan berinteraksi dalam lingkungan yang mendukung, sehingga selaras dengan tujuan pekerjaan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup kelompok rentan.

2.2.2. Tujuan dan Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial memiliki tujuan utama untuk membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar dapat berfungsi secara sosial dengan baik di lingkungannya. Tujuan tersebut didasari oleh nilai-nilai

kemanusiaan, keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Zastow C, 2017). Sejalan dengan itu, (Friedlander, 1980) menegaskan bahwa pekerjaan sosial tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pemulihan, dan pemberdayaan agar individu maupun masyarakat dapat hidup secara lebih sejahtera dan bermartabat. Dengan demikian, pekerjaan sosial berperan penting dalam memperkuat kapasitas manusia sekaligus memperbaiki kondisi sosial di sekitarnya.

(Fahrudin,2012) mengutip tujuan pekerjaan sosial menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika (NASW) adalah untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping) masalah, dan berkembang. Selanjutnya untuk menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.

Menurut (Friedlander, 1980a) terdapat tiga tujuan pokok pekerjaan sosial :

1. Membantu individu berfungsi secara efektif dalam lingkungannya
2. Memperbaiki kondisi sosial agar lebih mendukung kesejahteraan manusia dan,
3. Mendorong perubahan sosial yang berkeadilan. Ia menekankan bahwa pekerjaan sosial tidak semata-mata membantu orang menyesuaikan diri, tetapi juga berperan aktif dalam memperbaiki struktur sosial yang tidak adil atau menimbulkan ketimpangan.

Barker menjelaskan bahwa pekerjaan sosial bertujuan memecahkan masalah dalam hubungan sosial yang muncul akibat ketidakseimbangan antara individu dan lingkungannya Barker (2003). Oleh karena itu, pekerjaan sosial memfokuskan intervensinya pada perbaikan interaksi sosial, penguatan peran sosial, serta penyesuaian individu dengan sistem sosial yang ada.

Tujuan dan fungsi pekerjaan sosial memiliki keterkaitan yang kuat dengan Program Dali Kafe sebagai bentuk intervensi pemberdayaan. Program ini mencerminkan praktik pekerjaan sosial yang berorientasi pada peningkatan kemandirian, keberfungsian sosial, dan kesejahteraan individu spesial.

2.2.3. Peran Pekerjaan Sosial

Menurut Suharto Edi (2014b) menjelaskan bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi yang bertujuan membantu individu, kelompok, dan masyarakat agar mampu berfungsi sosial secara optimal. Pekerjaan sosial tidak hanya berorientasi pada pemecahan masalah sosial, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Peran pekerjaan sosial mencakup beberapa peran utama berikut.

1. Fasilitator

Berperan membantu klien mengenali masalah yang dihadapi serta potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dalam peran ini, pekerja sosial mempermudah akses klien terhadap pelayanan sosial, program kesejahteraan, dan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitarnya

agar klien mampu mengambil peran aktif dalam proses perubahan sosial.

2. Pendamping sosial

pendampingan merupakan inti dari praktik pekerjaan sosial. Pekerja sosial hadir secara berkelanjutan untuk memberikan dukungan sosial, emosional, dan motivasi kepada klien. Pendampingan dilakukan untuk memperkuat kemampuan individu atau kelompok dalam menjalankan fungsi sosialnya, terutama pada kelompok rentan dan marjinal.

3. Mediator

Dalam situasi konflik sosial atau permasalahan hubungan antara klien dengan keluarga, masyarakat, maupun lembaga, pekerja sosial berperan sebagai mediator. Pekerja sosial membantu membangun komunikasi, menciptakan dialog yang konstruktif, dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

4. Advokat

Pekerja sosial memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memperjuangkan hak-hak sosial klien. Peran advokasi dilakukan ketika klien mengalami ketidakadilan, diskriminasi, atau hambatan dalam mengakses pelayanan publik. Melalui advokasi, pekerja sosial mendorong perubahan kebijakan dan sistem sosial agar lebih berpihak pada kelompok yang lemah.

2.3. Konsep Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial sebagai inti dari praktik pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Zastrow, c (2017) , keberfungsian sosial merujuk pada kemampuan individu, keluarga, dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menjalankan peran sosial, serta mengatasi masalah kehidupan melalui interaksi yang efektif dengan lingkungan sosial. Konsep ini menekankan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial tempat ia hidup, seperti keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, dunia kerja, dan institusi sosial lainnya.

Seseorang dikatakan berfungsi secara sosial apabila ia mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta mengelola tekanan dan konflik yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Keberfungsian sosial tidak hanya berkaitan dengan kondisi internal individu, seperti kemampuan emosional dan keterampilan sosial, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti akses terhadap layanan sosial, dukungan sosial, dan kebijakan sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, keberfungsian sosial merupakan hasil dari interaksi antara kapasitas individu dan kondisi lingkungan sosial yang melingkupinya (Zastrow c, 2017).

Pandangan yang serupa dikemukakan oleh Suharto yang menyatakan bahwa keberfungsian sosial adalah kemampuan individu, keluarga, atau kelompok dalam menjalankan peran sosialnya secara wajar, memenuhi kebutuhan hidup, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Keberfungsian sosial dalam perspektif ini tidak hanya dilihat dari kemampuan individu untuk bertahan hidup, tetapi juga dari sejauh mana

individu mampu menjalankan fungsi sosialnya secara bermakna dan diterima dalam lingkungan sosialnya. Konsep ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan kesejahteraan sosial, yang menekankan terpenuhinya kebutuhan material, sosial, dan spiritual masyarakat secara seimbang (Suharto Edi, 2014a).

Keberfungsian sosial mencerminkan sejauh mana seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya, seperti peran sebagai anggota keluarga, pekerja, warga masyarakat, dan warga negara. Apabila individu mengalami hambatan dalam menjalankan peran-peran tersebut, maka individu tersebut berada dalam kondisi ketidakberfungsian sosial. Hambatan ini dapat bersumber dari faktor personal, seperti keterbatasan fisik atau psikologis, maupun faktor struktural, seperti kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya sistem perlindungan sosial (Suharto Edi, 2014a).

Keberfungsian sosial tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dapat berubah seiring dengan perubahan kondisi individu maupun lingkungan sosialnya. Individu yang pada satu waktu mengalami ketidakberfungsian sosial masih memiliki peluang untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya melalui intervensi sosial yang tepat, seperti pendampingan, pemberdayaan, dan penguatan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, praktik pekerjaan sosial memandang keberfungsian sosial sebagai fokus utama intervensi, dengan tujuan membantu individu atau kelompok agar mampu kembali menjalankan peran sosialnya secara optimal dan bermartabat (Charles Zastrow, 2017).

Dalam konteks penyandang disabilitas (Individu spesial), konsep keberfungsian sosial menjadi sangat relevan karena keterbatasan individu sering

berinteraksi dengan hambatan lingkungan yang menghambat partisipasi sosial. Keberfungsian sosial individu spesial tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi disabilitasnya, tetapi juga oleh sejauh mana lingkungan sosial mampu memberikan dukungan, penerimaan, dan akses yang inklusif. Dengan demikian, upaya meningkatkan keberfungsian sosial individu spesial perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan kapasitas individu, tetapi juga pada perubahan lingkungan sosial agar lebih responsif dan inklusif terhadap keberagaman kemampuan (Suharto Edi, 2014b).

2.4. Konsep Kemandirian

2.4.1. Definisi Kemandirian

Kemandirian tidak dimaknai sebagai kondisi hidup tanpa bantuan sama sekali, melainkan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan menentukan arah hidup berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kemandirian menekankan pada inisiatif dan kesadaran diri individu atau masyarakat yang mandiri mampu mengenali kebutuhan dan permasalahannya, kemudian berusaha mencari solusi secara aktif dengan memanfaatkan kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan yang dimiliki.

Kemandirian dipandang sebagai hasil dari proses pemberdayaan yang berkelanjutan, terutama melalui sinergi pendidikan formal, informal, dan nonformal. Pendidikan berperan membentuk individu dan masyarakat agar memiliki kemampuan berpikir kritis, kepercayaan diri, serta kesadaran akan tanggung jawab sosialnya. Dalam konteks ini, individu atau masyarakat

yang mandiri mampu mengenali masalah yang dihadapi, menganalisis situasi secara rasional, serta merumuskan solusi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungannya. Kemandirian juga menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya tanpa kehilangan kontrol atas arah kehidupannya (Winarti agus, 2022).

Kemandirian mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan. Secara psikologis, kemandirian tercermin dalam sikap percaya diri, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Secara sosial, kemandirian terlihat dari kemampuan menjalankan peran sosial, beradaptasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, serta membangun hubungan sosial yang konstruktif. Sementara itu, secara ekonomi, kemandirian berkaitan dengan kemampuan individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui keterampilan, usaha, dan pemanfaatan peluang yang ada. Oleh karena itu, kemandirian dipahami sebagai kondisi dinamis yang terus berkembang seiring meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat sebagai subjek pembangunan (Winarti agus, 2022) .

Kemandirian menurut Barker dipahami sebagai bagian dari konsep keberfungsian sosial, yaitu kemampuan individu untuk menjalankan peran sosialnya secara efektif dalam lingkungan sosial tempat ia berada. Barker menegaskan bahwa kemandirian tidak diartikan sebagai kondisi tanpa bantuan, melainkan sebagai kemampuan individu dalam mengambil keputusan, memenuhi kebutuhan hidup, serta mengelola kehidupannya sesuai

dengan kapasitas yang dimiliki. Dengan demikian, kemandirian berkaitan erat dengan kemampuan individu beradaptasi terhadap tuntutan sosial dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungannya (Barker, 2003).

Barker menjelaskan bahwa tingkat kemandirian seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personal, tetapi juga oleh dukungan dan kesempatan yang diberikan oleh lingkungan sosial. Dalam perspektif pekerjaan sosial, intervensi yang diberikan bukan untuk menghilangkan ketergantungan sepenuhnya, melainkan untuk memperkuat kapasitas individu agar mampu berfungsi dan berperan secara sosial secara optimal. Oleh karena itu, kemandirian bersifat kontekstual dan relatif, terutama bagi individu spesial, di mana dukungan dan pendampingan tetap menjadi bagian dari proses pembentukan kemandirian (Barker, 2003).

Program Dali Kafe memiliki keterkaitan yang kuat dengan kemandirian individu spesial karena berfungsi sebagai program pemberdayaan berbasis pengalaman kerja nyata. Melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas kafe, individu spesial dilatih untuk mengembangkan keterampilan kerja, membangun rasa percaya diri, serta belajar bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Proses ini membantu individu spesial mengambil inisiatif, membuat keputusan sederhana, dan menyelesaikan pekerjaan secara lebih mandiri, sehingga mendorong peningkatan kemandirian secara psikologis dan personal.

Selain itu, Program Dali Kafe juga berkontribusi terhadap kemandirian sosial dan ekonomi individu spesial. Interaksi dengan pendamping, rekan

kerja, dan pelanggan melatih kemampuan komunikasi serta adaptasi sosial, sementara pengalaman kerja produktif menjadi bekal penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Dengan demikian, Program Dali Kafe berperan sebagai sarana pemberdayaan yang mendorong individu spesial menjadi lebih mandiri, berdaya, dan mampu menjalankan peran sosialnya secara lebih optimal.

2.4.2. Kemandirian Disabilitas (Individu Spesial)

Secara umum, kemandirian penyandang disabilitas mencakup beberapa aspek utama, yaitu kemandirian fungsional, kemandirian psikologis, kemandirian sosial, dan kemandirian dalam pengambilan keputusan. Kemandirian fungsional berkaitan dengan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari seperti merawat diri dan menjalankan rutinitas. Kemandirian psikologis mencakup kemampuan mengelola emosi dan membangun rasa percaya diri. Kemandirian sosial ditunjukkan melalui kemampuan berinteraksi dan menjalankan peran sosial. Sementara itu, kemandirian dalam pengambilan keputusan tercermin dari kemampuan individu menentukan pilihan hidup sesuai dengan kapasitas yang dimiliki (Desmita, 2017).

Kemandirian merupakan salah satu konsep utama dalam kajian perkembangan individu dan kesejahteraan sosial, secara umum, kemandirian diartikan sebagai kemampuan individu untuk bertindak, mengambil keputusan, serta mengelola kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab tanpa ketergantungan yang berlebihan pada orang lain. Kemandirian tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga mencakup kemampuan

mengatur perilaku, mengelola emosi, serta menentukan pilihan hidup berdasarkan pertimbangan pribadi dan nilai-nilai yang dimiliki individu. Dengan demikian, kemandirian dipahami sebagai proses perkembangan yang berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh faktor internal maupun lingkungan sosial (Desmita, 2017) .

Dalam konteks penyandang disabilitas (Individu spesial), kemandirian tidak dimaknai sebagai kondisi tanpa bantuan sama sekali. Disabilitas dipahami sebagai hasil interaksi antara keterbatasan individu dan hambatan lingkungan, sehingga tingkat kemandirian sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial dan akses terhadap lingkungan yang inklusif INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING DISABILITY AND HEALTH (WORLD HEALTH ORGANIZATION GENEVA Etc.) (Z-Library) (n.d.). Oleh karena itu, kemandirian penyandang disabilitas lebih tepat dipahami sebagai kemampuan individu untuk berfungsi secara optimal sesuai kapasitas dengan dukungan yang proporsional.

Schlock menjelaskan bahwa kemandirian pada penyandang disabilitas (Individu Spesial) berkaitan erat dengan kualitas hidup dan kemampuan adaptif individu. Individu dengan disabilitas dikatakan mandiri apabila mampu menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta memiliki kendali terhadap pilihan hidupnya, meskipun dengan dukungan tertentu (Schalock et al., 2010).

Dengan demikian, konsep kemandirian individu spesial perlu dipahami secara komprehensif sebagai proses pemberdayaan yang menempatkan

individu sebagai subjek utama. Upaya membangun kemandirian harus diarahkan pada penguatan kemampuan adaptif, peningkatan kepercayaan diri, serta penciptaan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif individu spesial dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini menegaskan bahwa kemandirian bukan tujuan akhir yang bersifat absolut, melainkan proses berkelanjutan yang memungkinkan individu spesial untuk hidup secara bermakna, berdaya, dan memiliki peran dalam masyarakat sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya (Schalock et al., 2010)

2.4.3. Kemandirian Disabilitas Intelektual

Konsep kemandirian disabilitas secara umum memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ditandai oleh keterbatasan fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang mempengaruhi kemampuan konseptual, sosial, dan praktis individu dalam kehidupan sehari-hari (Schalock et al., 2010).

Keterbatasan fungsi intelektual tersebut menyebabkan kemandirian pada penyandang disabilitas intelektual tidak dapat disamakan dengan kemandirian individu non-disabilitas. Kemandirian pada kelompok ini bersifat bertahap, kontekstual, dan disesuaikan dengan kemampuan adaptif individu. Individu disabilitas intelektual dikatakan mandiri apabila mampu menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dan peran sosial secara konsisten sesuai dengan kapasitas kognitifnya, meskipun masih memerlukan pendampingan atau supervisi (Schalock et al., 2010).

Kemandirian pada disabilitas intelektual lebih menekankan pada penguasaan keterampilan adaptif. Schalock menjelaskan bahwa perilaku adaptif mencakup keterampilan praktis seperti merawat diri, keterampilan sosial seperti berinteraksi dan mengikuti aturan, serta keterampilan konseptual seperti memahami instruksi dan mengambil keputusan sederhana (Schalock et al., 2010)

perilaku adaptif pada penyandang disabilitas intelektual mencakup tiga domain utama, yaitu keterampilan konseptual, sosial, dan praktis. Keterampilan konseptual berkaitan dengan kemampuan dasar seperti memahami instruksi sederhana, mengenali waktu, dan mengelola aktivitas harian. Keterampilan sosial mencakup kemampuan berkomunikasi, menjalin interaksi, serta memahami norma sosial yang berlaku. Sementara itu, keterampilan praktis berkaitan dengan kemampuan menjalankan aktivitas fungsional, seperti merawat diri, bekerja, dan menggunakan fasilitas umum. Ketiga domain tersebut menjadi dasar dalam menilai tingkat kemandirian individu disabilitas intelektual dalam kehidupan sehari-hari. (Schalock et al., 2010)

Selain itu, Wehmeyer & Michael L. (1999) menegaskan bahwa kemandirian individu dengan disabilitas intelektual sangat berkaitan dengan konsep self-determination. Self-determination dipahami sebagai kemampuan individu untuk membuat pilihan, mengekspresikan keinginan, dan memiliki control terhadap kehidupannya sendiri sesuai dengan tingkat kemampuannya Wehmeyer & Michael L. (1999). Dalam konteks ini, pengambilan keputusan

sederhana seperti memilih aktivitas, menyampaikan kebutuha pribadi, atau menentukan preferensi menjadi bentuk nyata dari kemandirian.

2.5. Konsep Disabilitas

Disabilitas atau individu spesial dalam perspektif ilmu kesejahteraan sosial dipahami sebagai kondisi individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik yang dalam jangka waktu lama dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan sosial apabila berhadapan dengan berbagai hambatan lingkungan. Konsep disabilitas tidak hanya menekankan pada keterbatasan individu secara biologis, tetapi juga pada hubungan antara kondisi individu dengan lingkungan sosial, sikap masyarakat, serta sistem sosial yang belum sepenuhnya inklusif (Suharto Edi, 2014b) .

Menurut Suharto Edi (2014b), penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya akibat keterbatasan personal dan ketidaksiapan lingkungan sosial dalam menyediakan akses, kesempatan, dan dukungan yang memadai. Oleh karena itu, disabilitas tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kelemahan individu, melainkan sebagai persoalan sosial yang berkaitan erat dengan struktur masyarakat, kebijakan sosial, dan sistem pelayanan sosial yang tersedia. Apabila lingkungan sosial mampu memberikan dukungan yang tepat, maka individu spesial tetap dapat berfungsi secara sosial dan menjalani kehidupan secara bermartabat (Suharto Edi, 2014b) .

Sejalan dengan pandangan tersebut, World Health Organization melalui pendekatan sosial menegaskan bahwa disabilitas merupakan hasil interaksi antara individu yang memiliki keterbatasan fungsi dengan lingkungan yang penuh

hambatan. Dalam hal ini, keterbatasan fisik atau mental bukanlah faktor tunggal yang menentukan tingkat disabilitas, melainkan bagaimana masyarakat menyediakan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan sosial, dan ruang partisipasi sosial. Oleh karena itu, individu spesial memiliki potensi yang dapat dikembangkan apabila didukung oleh lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas (World Health Organization, 2011).

Dengan demikian, disabilitas atau individu spesial dapat dipahami sebagai individu yang memiliki keterbatasan tertentu yang memengaruhi kemampuan menjalankan fungsi sosialnya, namun tetap memiliki potensi untuk berkembang dan mandiri apabila memperoleh dukungan sosial, kesempatan, serta program pemberdayaan yang sesuai. Pemahaman ini menempatkan individu spesial sebagai subjek pembangunan sosial yang memiliki hak, martabat. Dan kapasitas untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, bukan sekedar sebagai objek belas kasihan atau penerima bantuan sosial semata.

Teori Model Sosial Disabilitas

Teori ini muncul sebagai kritik terhadap model medis yang memandang disabilitas sebagai masalah atau kekurangan yang berada pada diri individu. Menurut model sosial, keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi fisik, intelektual, sensorik, atau mental yang dimilikinya, tetapi lebih disebabkan oleh hambatan yang diciptakan oleh lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan fisik yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan mereka. (Oliver Michael, 1990)

Dalam perspektif model sosial, istilah *impairment* (hambatan atau keterbatasan fungsi tubuh) dibedakan dengan *disability* (ketidakmampuan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat). *Impairment* merupakan kondisi individu, sedangkan *disability* muncul karena adanya hambatan sosial yang menghalangi individu untuk berpartisipasi secara optimal. Dengan demikian, masalah utama bukan terletak pada individu penyandang disabilitas, melainkan pada masyarakat yang belum menyediakan akses, kesempatan, dan dukungan yang setara.

Model sosial menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang apabila memperoleh kesempatan yang sama dan lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan bukan hanya berfokus pada perbaikan kondisi individu, tetapi juga pada penciptaan lingkungan yang inklusif, aksesibel, dan bebas diskriminasi. Lingkungan yang mendukung dapat berupa penyediaan kesempatan kerja, pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan sosial, serta perubahan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Dalam konteks penelitian ini, Model Sosial Disabilitas dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa peningkatan kemandirian individu spesial tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki individu tersebut, tetapi juga oleh lingkungan yang mendukung proses pengembangannya. Program Dali Kafe menjadi salah satu bentuk lingkungan inklusif yang memberikan kesempatan kepada individu spesial untuk belajar, bekerja, berinteraksi, dan mengembangkan kemampuan sosial maupun keterampilan kerja. Melalui pendampingan yang konsisten, suasana yang menerima keberagaman, serta kesempatan untuk terlibat

dalam aktivitas produktif, hambatan sosial yang sebelumnya membatasi partisipasi individu spesial dapat dikurangi. Dengan demikian, perkembangan kemandirian yang terlihat pada kemampuan kerja, tanggung jawab, disiplin, kepercayaan diri, serta kemampuan sosial dan komunikasi merupakan hasil dari interaksi antara potensi individu dengan lingkungan yang mendukung.

2.6. Konsep *Non-Governmental Organization* (NGO)

2.6.1. Definisi *Non-Governmental Organization* (NGO)

NGO atau *Non-Governmental Organization* merupakan organisasi yang dibentuk oleh individu atau kelompok masyarakat secara sukarela, independen, dan tidak berada di bawah kendali langsung pemerintah. NGO bersifat nirlaba dan bertujuan untuk melayani kepentingan publik dengan fokus pada penyelesaian berbagai persoalan sosial, kemanusiaan, dan pembangunan masyarakat. Keberadaan NGO dilatarbelakangi oleh keterbatasan negara dan sektor swasta dalam menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marjinal seperti penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak (Lewis david, 2001)

Menurut Lewis, NGO memiliki karakteristik utama berupa kemandirian organisasi, orientasi pada pelayanan sosial, serta keterlibatan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput. NGO berfungsi sebagai aktor pembangunan yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan publik melalui kegiatan pelayanan, pendampingan, dan advokasi

sosial. Dalam menjalankan perannya, NGO mengedepankan prinsip partisipasi, keberlanjutan, dan pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian dalam mengelola kehidupannya sendiri (Lewis david, 2001).

Korten memandang NGO sebagai organisasi pembangunan yang berorientasi pada manusia dan perubahan sosial. Menurutnya, NGO bekerja dengan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. NGO tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga pada upaya jangka panjang melalui penguatan kesadaran kritis, pengembangan potensi lokal, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi. Dengan demikian, NGO berperan penting dalam mendorong keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan (Korten, 1990).

2.6.2. Peran *Non-Governmental Organization* (NGO) dalam Kemandirian Individu Spesial

NGO memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan kemandirian individu spesial melalui pendekatan pemberdayaan yang berorientasi pada penguatan kapasitas individu dan lingkungan sosialnya. NGO berfungsi sebagai pelaksana pelayanan sosial yang secara langsung merancang dan mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, pembinaan kerja, pendampingan sosial, dan kegiatan produktif yang disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan individu spesial. Melalui program-program

tersebut, individu spesial tidak hanya dibantu untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki, tetapi juga didorong untuk mengenali potensi diri, meningkatkan rasa percaya diri, serta mengembangkan kemampuan mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap peran yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini menjadi dasar penting dalam pembentukan kemandirian psikologis dan personal individu spesial (Lewis david, 2001).

Selain sebagai fasilitator program, NGO juga berperan sebagai pendamping sosial yang memberikan dukungan emosional, motivasional, dan sosial secara berkelanjutan. Pendampingan ini membantu individu spesial menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal seperti kurangnya kepercayaan diri dan keterbatasan keterampilan, maupun hambatan eksternal seperti stigma sosial, diskriminasi, dan minimnya kesempatan kerja. Melalui hubungan pendampingan yang intensif dan berkesinambungan, individu spesial dibantu untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial, membangun interaksi sosial yang positif, serta meningkatkan kemampuan menjalankan fungsi sosialnya secara lebih mandiri (Lewis david, 2001).

NGO berperan sebagai penghubung akses dan peluang bagi individu spesial terhadap berbagai sumber daya sosial, pendidikan, dan ekonomi. NGO membantu membuka akses individu spesial ke dunia kerja, pelatihan vokasional, dan kegiatan ekonomi produktif sehingga individu tidak hanya menjadi penerima bantuan sosial, tetapi mampu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang bernilai produktif. Peran ini sangat penting dalam

membangun kemandirian ekonomi individu spesial, karena melalui keterampilan dan pengalaman kerja yang diperoleh, individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada keluarga maupun lembaga sosial (Lewis david, 2001).

Di samping itu, NGO juga menjalankan fungsi advokasi sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah disabilitas. Melalui edukasi publik dan pengaruh terhadap kebijakan sosial, NGO berupaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap individu spesial serta mendorong terciptanya kesempatan yang setara dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Lingkungan sosial yang mendukung ini menjadi faktor penting dalam membangun kemandirian individu spesial secara berkelanjutan, karena kemandirian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh sejauh mana sistem sosial memberikan ruang partisipasi dan dukungan yang adil. Dengan demikian, NGO dapat dipahami sebagai aktor kunci dalam sistem kesejahteraan sosial yang berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kemandirian, keberfungsian sosial, dan kualitas hidup individu spesial (Lewis david, 2001).

2.7. Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan artikel jurnal terdahulu yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai referensi dalam melaksanakan penelitian. Berikut merupakan beberapa artikel jurnal yang digunakan, yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Komponen	Keterangan
1.	Nama Penulis	Teti Rahmawati, Siti Nuke Nurfatihah, Hayinah Rahayu, Wulan Salma Hana, Reyhan Rizalul Dzikri
	Judul Artikel	Menggagas Kemandirian: Resilience Disabilitas Rungu Wicara Desa Singaparna melalui Pelatihan Kepercayaan Diri untuk Berwirausaha Roti
	Nama Jurnal	Jurnal Pengabdian Masyarakat
	Metode	Kualitatif
	Kesimpulan	"Menggagas Kemandirian: Resilience Disabilitas Rungu Wicara di Desa Singaparna melalui Pelatihan Kepercayaan Diri" berhasil meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian penyandang disabilitas rungu wicara melalui pendekatan pelatihan interaktif, mentoring, kelompok dukungan sebaya, workshop pemberdayaan diri, simulasi sosial, dan evaluasi reflektif.
	URL/DOI	https://doi.org/10.25134/empowerment.v7i02.10580
	Nama Penulis	Rofi'ah Inggil Pangestu,1* Sri Wibawani2
	Judul Artikel	STRATEGI PEMBERDAYAAN PROGRAM KAREPE DIMESEMIBOJO PADA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
2.	Nama Jurnal	Jurnal Kebijakan Publik

	Metode	Kualitatif
	Kesimpulan	Strategi pemberdayaan program Karepe Di mesemi Bojo pada penyandang disabilitas mental https://jkp.ejournal.unri.ac.id 235 Jurnal Kebijakan Publik, Vol.13, No.3, 2022 di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang yang diukur dengan 3 (tiga) aras pemberdayaan cukup berhasil dalam pemberdayaan.
	URL/DOI	http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8027
3.	Nama Penulis	Didip Diandra
	Judul Artikel	Program Pengembangan Kewirausahaan Untuk Menciptakan Pelaku Usaha Sosial Yang Kompetitif
	Nama Jurnal	<u>Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar</u>
	Metode	Kualitatif
	Kesimpulan	Penelitian ini menganalisis bagaimana implikasi program pengembangan kewirausahaan bagi pelaku usaha sosial dalam meningkatkan pengetahuan kewirausahaan, kemampuan kewirausahaan, dan mental kewirausahaan sehingga terciptanya pelaku usaha yang kompetitif dan berdaya saing tinggi baik dari segi penciptaan produk ataupun jasa, maupun keahlian di bidang teknis dan lunak.

	URL/DOI	https://doi.org/10.35313/irwns.v10i1.1424
	Nama Penulis	Tony Yuri Rahmanto
4.	Judul Artikel	Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
	Nama Jurnal	Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
	Metode	Kualitatif
	Kesimpulan	Penyandang disabilitas mental sejatinya merupakan seseorang yang mengalami gangguan terhadap fungsi pikir, emosi, dan perilaku namun demikian kondisi tersebut merupakan kondisi episodik atau tidak permanen.
	URL/DOI	https://doi.org/10.31105/jpks.v18i3.1611
	Nama Penulis	Marina Rahayu ¹ , Hanikhatul Munawarah ² , Sriyani ³ , Riry Eka Putri Septiani ⁴ , Linni Turia Putri ⁵ , Melinia Pratiwi ⁶ , Yolgi Julianto ⁷ , Ramadhanti Rizka ⁸ , Vio Ateza Sembiring ⁹ , M.Irfan
5.	Judul Artikel	PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL PADA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI PANTI SOSIAL BINA LARAS PAMBELUM
	Nama Jurnal	Jurnal Bimbingan dan Konseling Pandohop
	Metode	Kualitatif

	Kesimpulan	Pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan salah satunya oleh pekerja sosial. Pekerja Sosial membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam keberfungsian sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang akan mencapai tujuan
	URL/DOI	https://doi.org/10.37304/pandohop.v2i2.5061
6.	Nama Penulis	Endang Komara, Ida Rukhaida, Dani Wardani, Sunsun P, Yogaswara
	Judul Artikel	Analisis Psikologi Implementasi Program Kewirausahaan di SMK untuk Membangun Jiwa Entrepreneurship
	Nama Jurnal	Jurnal Kependidikan
	Metode	Kualitatif
	Kesimpulan	Program kewirausahaan di SMK Negeri Peternakan Lembang mengalami hambatan seperti kurangnya motivasi dan kepercayaan diri, kerjasama tim, kejujuran, dan keberanian dalam mengambil resiko.
	URL/DOI	https://doi.org/10.58230/27454312.409
	Nama Penulis	Siti Hikmah, Septiana Ambarwati, Sri Ayu Lestari, Anisa Arwah Lia
	Judul Artikel	Penggunaan Art Therapy dan Dance Therapy untuk Meningkatkan Suasana Hati pada Penerima Manfaat

		Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu Kendal
7.	Nama Jurnal	Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
	Metode	Kualitatif
	Kesimpulan	Berdasarkan intervensi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan art therapy dan dance therapy di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu berhasil meningkatkan suasana hati penerima manfaat. Sebelum intervensi, sebagian besar penerima manfaat merasa sedih, sebagaimana tercermin dalam hasil pre-test.
	URL/DOI	https://doi.org/10.62951/karyanyata.v1i4.882
	Nama Penulis	Nurkolis ¹ , MA. Primaningrum Dian Marthaningtyas ² , Dini Rakhmawati
	Judul Artikel	PERAN KEPEMIMPINAN ADAPTIF DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN WIRAUSAHA SOSIAL BAGI DISABILITAS MENTAL
8.	Nama Jurnal	Prosiding Seminar Nasional
	Metode	Kualitatif
	Kesimpulan	Berdasarkan uraian di atas bahwa peran kepemimpinan adaptif menjadi peran yang penting bagi penyandang disabilitas mental. Kepemimpinan adaptif dapat

		memberikan dukungan yang positif bagi penyandang disabilitas mental untuk dapat menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi dengan cepat.
	URL/DOI	Nurkolis, N., Marthaningtyas, M. P. D., & Rakhmawati, D. (2024). Peran Kepemimpinan Adaptif dalam Meningkatkan Ketahanan Wirausaha Sosial bagi Disabilitas Mental. In <i>SABDA (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia)</i> (Vol. 1, No. 1).
	Nama Penulis	Ani Mardiyati
	Judul Artikel	PERAN PENDAMPING BERBASIS MASYARAKAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN
9.	Nama Jurnal	Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial
	Metode	Kualitatif
	Kesimpulan	Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas dalam menjalani fungsi sosial di masyarakat menggugah para relawan yang sudah terbiasa aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
	URL/DOI	https://doi.org/10.31105/mipks.v41i2.2265
	Nama Penulis	M. Haris Satrial, Hilmy Aliriad, Selvi Atesya Kesumawati, Husni Fahrītsani, I Bagus Endrawan, Adi S

10	Judul Artikel	Model Pengembangan Keterampilan Motorik My Home Environment terhadap Anak Disabilitas Intelektual
	Nama Jurnal	Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini
	Metode	Kuantitatif
	Kesimpulan	Dalam penelitian ini, dihasilkan sebuah model My Home Environment yang dapat meningkatkan keterampilan motorik, keterampilan kognitif, serta meningkatkan kesenangan dan fokus perhatian pada anak-anak dengan DI ringan yang berusia 5-6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Model pembelajaran ini menggunakan media yang aman, murah, edukatif, dan menyenangkan bagi anak-anak.
	URL/DOI	https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/4946

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu. Penelitian Rahmawati et al. (2024). Menekankan bahwa pelatihan kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas rungu wicara mampu mendorong kesiapan individu dalam berwirausaha, terutama dalam aspek psikologis seperti rasa percaya diri dan keberanian mengambil peran sosial. Sementara itu, penelitian Pangestu dan Wibawani menunjukkan bahwa

strategi pemberdayaan yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan dan kemandirian penyandang disabilitas mental, khususnya melalui pendampingan yang konsisten dan dukungan lingkungan sosial.

Selain itu, penelitian Diandra (n.d.) membahas pengembangan kewirausahaan dalam konteks pelaku usaha sosial secara umum, dengan menekankan peningkatan pengetahuan kewirausahaan, kemampuan teknis, dan mental kewirausahaan sebagai faktor penting dalam menciptakan individu yang berdaya dan mandiri. Namun, penelitian tersebut tidak secara khusus menempatkan individu spesial sebagai subjek utama, serta belum mengkaji pemberdayaan dalam konteks unit usaha sosial yang melibatkan individu spesial secara langsung dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji dampak Program Dali Kafe terhadap kemandirian individu spesial di Yayasan Budaya Individu Spesial. Penelitian ini menitikberatkan pada pengalaman individu spesial usia dewasa yang terlibat langsung dalam program kewirausahaan berbasis praktik kerja nyata. Fokus penelitian tidak hanya pada peningkatan keterampilan atau aspek psikologis semata, tetapi juga pada perubahan kemandirian secara holistik, meliputi kemampuan menjalankan tanggung jawab, berinteraksi sosial, serta mengambil peran dalam kegiatan usaha. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dari penelitian terdahulu, baik dari sisi konteks program, subjek penelitian, maupun pendekatan pemberdayaan yang diterapkan, sehingga diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya kajian mengenai

kemandirian individu spesial melalui program pemberdayaan berbasis kewirausahaan.